

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penyebab dan penanganan konflik yang terjadi antara desa Agom Kecamatan Kalianda dan Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Konflik yang terjadi antara Desa Agom yang bersuku Lampung dan Desa Balinuraga yang bersuku Bali di Kabupaten Lampung Selatan disebabkan antara lain :
 - 1.1. Terjadinya resistensi antara negara dengan masyarakat lokal yang mengakibatkan tidak meratanya pembangunan yang menyebabkan kecemburuan sosial. Akibat dari resistensi tersebut terbentuk perkembangan yang berbeda antara desa yang dihuni penduduk pendatang dengan desa yang dihuni penduduk lokal. Tingkat kesejahteraan menjadi acuan utama dalam melihat perkembangan kedua desa tersebut, selain masalah sarana dan prasarana serta infrastruktur. Sikap pemerintah daerah terhadap penduduk lokal dan transmigran turut menambah kecemburuan sosial yang ada. Perhatian pemerintah lebih banyak kepada penduduk transmigran dikarenakan hubungannya dengan pemerintah tidak mengalami resistensi.

1.2. Isu Kesukuan

Sikap perasangka buruk terhadap dari suku lainya dan menganggap suku tersebut merupakan ancaman (*setereotipe*) menjadi faktor pendorong terjadinya konflik yang dialami oleh kedua suku ini (Lampung dan Bali). Pemahaman nilai-nilai luhur budaya (*muaghi* dan *wewegawe*) dan sikap kebangsaan sudah luntur di masyarakat. Tindakan kekerasan yang dilakukan dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi terlepas dari besar atau kecilnya masalah yang dialami turut memperparah prilaku kedua suku ini. Tindakan main hakim sendiri dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat tersebut menjadi problem yang harus segera diselesaikan

1.3. Kenakalan Remaja

Masalah Kenakalan Remaja yang terjadi di daerah tersebut seperti membuat keributan di tempat umum selalu menjadi pemicu setiap konflik yang terjadi antara kedua suku ini. Kurang maksimalnya pembinaan pemuda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi alasan mengapa kenakalan remaja di daerah ini terus terjadi.

1.4. .Kegagalan Negoisasi.

Tidak bertemunya kesepakatan yang dilakukan antar kedua kepala desa yaitu Kepala desa Agom dan Balinuraga sesaat setelah kejadian kecelakaan tersebut yang bertempat di Desa Patok menjadi pertanda awal meletusnya konflik yang berujung kerusuhan massal yang melibatkan puluhan ribu warga. Komunikasi yang terputus antar kedua kepala desa mengakibatkan isu-isu provokatif berkembang di masyarakat.

2. Penanganan konflik yang dilakukan terdiri dari saat terjadinya konflik dan pasca terjadinya konflik, yaitu :
 - 2.1 Pada saat terjadinya konflik aparat keamanan melakukan operasi keamanan yang bersifat *represif*. Operasi *represif* dilakukan karena masalah yang terjadi tidak bisa ditangani secara *persuasive*. Kegagalan negosiasi menyebabkan operasi keamanan secara terpaksa dilakukan. Aparat keamanan kepolisian setempat yang dibantu dengan Kepolisian daerah lainya seperti Polda Jateng, Cibinong, Palembang serta aparat TNI nyatanya tidak mampu meredam dan mengalihkan massa yang sudah emosional. Selain itu Jumlah massa yang tidak sebanding dengan aparat kemanan mnenjadi alasan utama mengapa konflik tersebut tidak bisa diredam oleh aparat keamanan. Jumlah massa yang mencapai kurang lebih 15.000 jiwa tidak mampu diatasi oleh aparat keamanan yang berjumlah tidak lebih dari 3000 personel. Sehingga konflik tersebut mengakibatkan 12 orang tewas dan ratusan rumah rusak
 - 2.2 Penanganan pasca konflik dilakukan dengan membuat piagam perdamaian kedua yang diikrarkan pada tanggal 4 November 2012. Piagam perdamaian tersebut menegaskan sanksi pengusiran bagi warga Lampung Selatan yang tidak mau bertanggungjawab atas kesalahan yang dibuat. Piagam Perdamaian tersebut direspon positif oleh Desa Balinuraga dengan membuat peraturan adat bernama *wewegawe* dan mengintensifkan kegiatan *pasraman* bagi muda mudinya (semacam ceramah dan pembinaan rohani bagi agama Hindu). Reaksi yang berbeda ditunjukkan oleh desa agom dengan menganggap kejadian sudah selesai dan

tidak ada tindakan baru atau mengintensifkan kegiatan yang ada agar difokuskan pada pembinaan pemuda pemudi desa tersebut. Selain itu aparat keamanan bekerjasama dengan Pemerintah daerah menggulirkan program rembug pekon pada tahun 2013 demi mengantisipasi hal serupa terulang

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Sektor swasta yang menjadi bagian dari *governance* harus mampu mendukung masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat sekitar dengan mekanisme monitoring, membuat peta potensi konflik yang bekerjasama dengan aparat keamanan serta pendeteksian dini sumber sumber konflik yang bisa dikomunikasikan di Program rembug pekon. Program rembug pekon seyogyanya harus melibatkan unsur swasta dalam implementasinya.
2. Peran sektor swasta diharapkan mampu menjadi kontributor dalam proses resolusi konflik terutama pada penyediaan lapangan pekerjaan bagi pemuda pemudi daerah sekitar sehingga masalah kenakalan remaja dapat ditangani dengan benar yang disebabkan salah satunya yakni pengangguran
3. Revitalisasi program CSR (*Corporate social responsibility*) yang dilakukan pihak swasta di daerah tersebut. Program CSR haruslah tepat sasaran dan berorientasi ke arah pembangunan yang seimbang antara fisik (infrastruktur)

dan non fisik (Suprastruktur) di masyarakat. Terutama pembangunan mental dan karakter masyarakat sekitar.

4. Program Rembug Pekon yang digulirkan haruslah sinergi dengan program Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga tidak tumpang tindih. Rembug pekon haruslah mampu mendeteksi potensi konflik yang diakibatkan masalah pembangunan dan Musrembangdes seyogyanya menjadi wadah aspirasi pembangunan yang demokratis dan jauh dari kesan formalitas semata.
5. Pemerintah Daerah bekerjasama pihak swasta harus gencar mensosialisasikan kearifan lokal yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Lampung Selatan terutama pada generasi mudanya sehingga nilai-nilai luhur tersebut tetap lestari. Pemerintah dan pihak swasta juga harus turut serta mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mampu menciptakan interaksi yang positif terhadap suku-suku yang ada di daerah Lampung Selatan dengan melibatkan semua lapisan masyarakat yang ada, sehingga tercipta rasa saling menghormati dan menghargai antar suku.
6. Pemerintah, masyarakat setempat berserta pihak swasta bahu membahu dalam pemulihan kondisi fisik dan mental para korban akibat konflik tersebut. Sikap saling memaafkan dan ikhlas terhadap apa yang telah terjadi sehingga dendam dendam yang ada dapat dilupakan agar konflik serupa tidak terulang kembali.
7. Penduduk asli dan penduduk pendatang haruslah *adaptif* serta *responsible* terhadap kemajemukan yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Sikap arif dan bijaksana dalam menyikapi kemajemukan yang ada di daerah tersebut menjadi kunci perdamaian dan penyelesaian konflik.

